



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT  
HINDU

# LAPORAN KINERJA

## Triwulan II

Tahun 2022



## KATA PENGANTAR

Atas *Asung Kertha Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa*/Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja TW II Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu (Ditjen Bimas Hindu) Tahun Anggaran 2022. Laporan ini memberikan gambaran capaian kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana kerja tahunan Ditjen Bimas Hindu dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024, dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama 2020-2024, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen Bimas Hindu tahun 2022. Laporan Kinerja TW II Ditjen Bimas Hindu Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban prinsip akuntabilitas dan transparansi kepada publik dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian kinerja TW II tahun 2022 merupakan pencapaian triwulan pertama pada tahun 2022 dan tahun ketiga periode Renstra 2020-2024 dan sekaligus menjadi acuan untuk menetapkan target pelaksanaan rencana kerja pada tahun berjalan serta pada tahun- tahun berikutnya. Laporan Kinerja TW II Ditjen Bimas Hindu Tahun 2022 diharapkan dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan. Pencapaian dan kekurangan dalam laporan ini kiranya dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh jajaran pejabat dan pegawai Ditjen Bimas Hindu.

Jakarta, 13 Juli 2022

Sekretaris Ditjen Bimas Hindu



I Made Santika

# Ringkasan Eksekutif

Visi Presiden dan Wakil Presiden Periode Tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Kementerian Agama memiliki peran yang sangat strategis didalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang agama dan bidang pendidikan di seluruh jenjang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Visi Kementerian Agama sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2020-2024 adalah “Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”

Renstra 2020-2024 Ditjen Bimas Hindu disusun merujuk pada Renstra Kementerian Agama 2020-2024 dan berpedoman pada RPJMN 2020-2024. Renstra Ditjen Bimas Hindu memuat tujuan, arah kebijakan, dan strategi Ditjen Bimas Hindu selama 5 tahun fokus pada pencapaian Visi dan Misi Kementerian Agama 2020-2024. Guna mewujudkan visi Kementerian Agama, Ditjen Bimas Hindu menetapkan 20 Sasaran Program (SP) dan 36 Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP). Sasaran program tersebut terbagi menjadi sasaran program bidang agama dan bidang pendidikan Hindu serta dukungan manajemen.

Kinerja Ditjen Bimas Hindu diukur dengan membandingkan realisasi dengan target yang diperjanjikan. Capaian kinerja Ditjen Bimas Hindu triwulan II tahun 2022 sebesar **45,38%** kategori **Kurang**. Capaian ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan I tahun 2022 yang hanya sebesar **19,54%**. Bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya pada periode yang sama sebesar **35,26%**, maka capaian triwulan II tahun 2022 **lebih baik** dari triwulan II tahun 2021.

Capaian tersebut, diperoleh dari hasil pengukuran 36 IKSP. Adapun

rinciannya yaitu terdapat 7 IKSP dengan capaian diatas 100% kategori sangat baik, 4 IKSP capaiannya antara 80% hingga 100% kategori baik, 2 IKSP dengan capaian antara 50% hingga 79,99% dengan kategori cukup dan 23 IKSP belum dapat diukur capaiannya karena masih berproses sehingga dimasukkan dalam kategori kurang. Adapun IKSP yang memperoleh capaian kategori sangat baik yakni persentase Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang melaksanakan prosedur Sistem Penjaminan Mutu dan Manajemen Kelembagaan, persentase PTKH yang melaksanakan Prosedur Sistem Penjaminan Mutu dan Manajemen Kelembagaan, persentase siswa Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang memperoleh nilai karakter minimal baik, persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional, persentase tindaklanjut hasil pengawasan yang diselesaikan, Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Rata-rata capaian realisasi anggaran Ditjen Bimas Hindu triwulan II Tahun 2022 sebesar Rp **360.141.247.187** atau **46,08%** dari jumlah anggaran sebesar Rp 781.500.789.000. Realisasi ini mengalami **kenaikan** dibandingkan dengan triwulan I tahun 2022 yang sebesar Rp **137.037.254.777** atau **17,54%**. Rata-rata realisasi triwulan II tahun 2022 **lebih baik** dari triwulan II tahun 2021 yang hanya sebesar 43,38%. Terdapat gap kenaikan sebesar 2,71% dari tahun sebelumnya pada periode yang sama. Untuk Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen Bimas Hindu Triwulan II tahun 2022 sebesar **58,97** kategori **kurang**. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar 11,00 dari NKA triwulan I 2022 yang sebesar 47,97.

Target realisasi anggaran minimal triwulan II tahun 2022 berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga yaitu untuk jenis belanja pegawai sebesar 50%, untuk belanja barang sebesar 50%, belanja modal sebesar 40% dan belanja bansos sebesar 50%. Sedangkan realisasi Ditjen Bimas Hindu triwulan II tahun 2022 berdasarkan belanja pegawai sebesar 43,81%, belanja barang sebesar 51,56%, belanja modal sebesar 28,08% dan

belanja bantuan sosial sebesar 58,92%. Hal ini menunjukkan bahwa untuk realisasi belanja pegawai dan belanja modal lebih kecil dari target realisasi minimal. Sedangkan realisasi belanja barang dan belanja bantuan sosial triwulan II tahun 2022 mencapai target realisasi minimal.

# DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif .....	1
DAFTAR ISI.....	4
<b>Bab I Pendahuluan .....</b>	<b>5</b>
A.    LATAR BELAKANG .....	5
B.    MAKSUD DAN TUJUAN .....	5
C.    TUGAS DAN FUNGSI .....	6
D.    STRUKTUR ORGANISASI.....	7
E.    SUMBER DAYA MANUSIA.....	8
F.    ISU – ISU STRATEGIS.....	9
G.    SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN.....	11
<b>Bab II Perencanaan Kinerja .....</b>	<b>13</b>
A.    RENCANA STRATEGIS.....	13
B.    PENETAPAN KINERJA.....	23
C.    PERENCANAAN ANGGARAN .....	27
<b>Bab III Akuntabilitas Kinerja .....</b>	<b>31</b>
A.    CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022.....	31
B.    REALISASI ANGGARAN .....	45
C.    NILAI KINERJA ANGGARAN .....	52
<b>Bab IV Penutup .....</b>	<b>54</b>
A.    KESIMPULAN.....	54
B.    SARAN.....	55

# Bab I

## Pendahuluan

### A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Ditjen Bimas Hindu Tahun 2022 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban tugas dan fungsi terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran tahun 2022 secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban triwulan II tahun ketiga pelaksanaan Renstra 2020-2024.

Laporan Kinerja ini implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pada Kementerian Agama.

### B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu kepada Menteri Agama dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tahun 2022.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Ditjen Bimas Hindu adalah untuk melakukan evaluasi dan pengukuran atas pencapaian kinerja organisasi dan juga pencapaian kinerja anggaran yang diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi penentuan kebijakan selanjutnya.

### C. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama maka Kedudukan, Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu adalah sebagai berikut :

#### 1. Kedudukan

- a. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama;
- b. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal

#### 2. Tugas

Sesuai pasal 606 Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi di bidang bimbingan masyarakat Hindu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

#### 3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu menyelenggarakan fungsi sesuai pasal 607 yakni:

- a. Melaksanakan perumusan kebijakan di bidang urusan agama, pendidikan agama dan keagamaan Hindu;
- b. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang urusan agama, pendidikan agama dan keagamaan Hindu;
- c. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan Hindu;
- d. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang urusan agama dan pendidikan Hindu;



- e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang urusan agama dan pendidikan Hindu;
- f. Melaksanakan administrasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu; dan
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

#### D. STRUKTUR ORGANISASI

Didalam Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 menjelaskan bahwa struktur organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu terdiri atas :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu
2. Direktorat Urusan Agama Hindu
3. Direktorat Pendidikan Hindu

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu merupakan salah satu unit yang mendukung program penyederhanaan birokrasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo. Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/708/M.SM.02.00/2020 tanggal 6 November 2020 terdapat 22 jabatan struktural pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu yang disetarakan menjadi Jabatan Fungsional. Namun penyetaraan tersebut belum dibarengi dengan perubahan organisasi dan tata kerja sehingga sampai saat ini organisasi dan tata kerja masih mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016. Selanjutnya untuk penjabaran organisasi dan tata kerja Ditjen Bimas Hindu berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tergambar pada diagram 1.



Diagram 1  
Struktur Organisasi

## E. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu didukung oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Pembimas dan Kepala Bidang serta Penyelenggara dan Kasi di Kanwil / Kabupaten / Kota. Secara kuantitas ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki saat ini masih belum mencukupi, dalam penempatan pegawai juga belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan sehingga tidak semua pekerjaan dapat ditangani dan diselesaikan secara maksimal. Sehingga untuk memaksimalkan kinerja, Ditjen Bimas Hindu melakukan upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM yang memadai sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Komposisi SDM yang dimiliki oleh Ditjen Bimas Hindu terdapat pada Tabel 1.

Tabel. 1  
Komposisi Sumber Daya Manusia Aparatur  
pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Tahun 2022

Satker	Uraian	Jumlah
Pusat	Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	1 Orang
	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1 Orang
	Jabatan Administrator	4 Orang
	Jabatan Pengawas	8 Orang
	Jabatan Fungsional	28 Orang
	Jabatan Pelaksana	49 Orang
	Pramubakti/Pramusaji/Sopir/Satpam	29 Orang
<b>Jumlah SDM Pusat</b>		<b>120 Orang</b>
Kantor Wilayah Prop/Kab/Kota Se-Indonesia	Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Hindu	5 Orang
	Pembimbing Masyarakat Hindu	26 Orang
	Kasi/ Penyelenggara Bimbingan Masyarakat Hindu	94 Orang
	Penyuluh PNS	141 Orang
	Penyulun Non PNS	1.694 Orang
	Pramubakti/Pramusaji/Sopir/Satpam	85 Orang
<b>Jumlah SDM pada Kantor Wilayah Prop/Kab/Kota Se-Indonesia</b>		<b>2.045 Orang</b>
PTKHN	Dosen Tetap	547 Orang
	Dosen Tidak Tetap	15 Orang
	Tenaga Administrasi	164 Orang
	Pramubakti/Pramusaji/Sopir/Satpam	246 Orang
<b>Jumlah SDM pada PTKHN Se-Indonesia</b>		<b>972 Orang</b>

Dari komposisi diatas dapat di ketahui bahwa dengan jumlah pegawai yang terbatas tidak menyurutkan semangat Ditjen Bimas Hindu untuk tetap melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat walaupun dengan berbagai kendala yang dihadapi.

## F. ISU – ISU STRATEGIS

Ditjen Bimas Hindu senantiasa berkomitmen untuk mewujudkan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Ditjen Bimas Hindu 2020-2024, baik dalam bidang agama, pendidikan agama dan keagamaan serta dukungan manajemen. Dalam upaya pencapaian sasaran program telah teridentifikasi

beberapa permasalahan yang dihadapi Ditjen Bimas Hindu dalam pelaksanaan Renstra Ditjen Bimas Hindu. Adapun permasalahan yang telah teridentifikasi sebagai berikut :

1) Bidang Urusan

Permasalahan utama pada bidang Urusan Agama Hindu meliputi:

- a. Masih minimnya regulasi terkait urusan agama seperti terkait lembaga agama dan lembaga keagamaan, tata kelola dana punia dan juga tata kelola pemberdayaan ekonomi umat;
- b. Masih lemahnya ketahanan keluarga, tidak sedikit keluarga yang bermasalah bahkan gagal di tengah jalan, karena sebagian anggota keluarga tidak memiliki rasa tanggung jawab dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya dalam keluarga. Sementara itu anak-anak yang tumbuh dalam keluarga bermasalah, akan menderita dan akan mengalami gangguan baik secara mental maupun jasmani. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pembinaan terhadap anak-anak atau keluarga, untuk itu perlu upaya-upaya yang preventif guna memperbaiki kualitas keluarga;
- c. Pelayanan urusan agama belum sepenuhnya difasilitasi secara maksimal, misalnya pemenuhan lahan kremasi dan sarana prasarana peribadatan lainnya

2) Bidang Pendidikan

- a. Pesebaran dan pemenuhan jumlah guru agama Hindu yang belum merata sehingga tidak semua siswa mendapat layanan pendidikan agama seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang, hal ini dikarenakan minimnya pengangkatan guru agama Hindu oleh Pemerintah Daerah;
- b. Lambatnya proses Inpasing bagi Guru Agama Hindu Non PNS karena belum adanya regulasi yang jelas dalam proses Inpasing Guru Agama Hindu Non PNS;
- c. Kebijakan merdeka belajar yang belum di dukung oleh pedoman teknis untuk penerapan di masing-masing satuan pendidikan;
- d. Belum terpenuhinya kebutuhan buku pelajaran agama;

- e. Kompetensi tenaga pendidik dan pengawas yang belum memenuhi standar nasional;
- f. Pengelolaan Lulusan PTKH belum maksimal sehingga data lulusan yang terjaring dunia kerja tidak diketahui;
- g. Ketersediaan sarana dan prasarana PTKH yang belum memenuhi standar seperti ketersediaan lahan kampus;
- h. Masih minimnya hasil penelitian yang dimanfaatkan dan terpublikasi

### 3) Bidang Dukungan Manajemen

- a. Penyetaraan jabatan tidak dibarengi dengan penataan organisasi dan tata kerja sehingga terjadi ketidakpastian dalam pelaksanaan tugas;
- b. Capaian kinerja belum dijadikan dasar dalam pembayaran tunjangan kinerja karena sampai saat ini pembayaran tunjangan kinerja hanya berdasarkan kehadiran
- c. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum terimplementasi
- d. Dalam menyusun target perencanaan belum di dukung dengan data yang memadai
- e. Terjadinya krisis SDM di daerah untuk beberapa tahun kedepan karena gelombang pensiun
- f. Pelayanan umat belum maksimal mengingat beberapa propinsi belum terdapat struktur Pembimas Hindu dan Penyelenggara untuk tingkat Kabupaten/Kota

## G. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Laporan Kinerja Triwulan II tahun 2022 Ditjen Bimas Hindu disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

### Bab I – Pendahuluan

Pada Bab ini diurai secara singkat latar belakang penyusunan laporan, gambaran organisasi, aspek strategis dan isu strategis serta sistematika penyajian;

## BAB II – Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menyajikan secara ringkas tentang rencana strategis 2020-2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Pengukuran Kinerja;

## BAB III – Akuntabilitas Kinerja

Mengurai dan menjelaskan capaian kinerja Ditjen Bimas Hindu untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan analisis serta evaluasi terhadap capaian kinerja dan realisasi anggaran sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja;

## BAB IV – Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan II Tahun 2022 Ditjen Bimas Hindu dan menguraikan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

# Bab II

## Perencanaan Kinerja

### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Tahun 2020-2024 ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor 127 Tahun 2020 memuat visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai Ditjen Bimas Hindu selama 5 tahun.

Sesuai dengan amanat Presiden dan Wakil Presiden bahwa hanya ada visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Tingkat Kementerian/Lembaga sebagai pendukung dan memberikan kontribusi mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan karakteristik bidangnya. Adapun visi, misi dan tujuan dari Kementerian Agama yakni:

#### 1. Visi

**“Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.”**

#### 2. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;
- 2) Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
- 3) Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
- 4) Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
- 5) Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan; dan
- 6) Memantapkan tatakelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

### 3. Tujuan

- 1) Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;
- 2) Peningkatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
- 3) Peningkatkan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
- 4) Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan keagamaan yang berkualitas;
- 5) Peningkatan lulusan Pendidikan agama dan keagamaan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif; dan
- 6) Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsive.

### 4. Arah Kebijakan dan Strategi

Ditjen Bimas Hindu menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang agama dan pendidikan dalam lima tahun ke depan sesuai dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 serta kebijakan Kementerian Agama. Adapaun kebijakan dan strategi Ditjen Bimas Hindu sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Hindu dicapai dengan strategi:
  - a. Pembinaan dan peningkatan kompetensi penyuluh agama Hindu sekaligus sebagai agen siar dharma dalam melakukan bimbingan keagamaan kepada umat Hindu
  - b. Peningkatan frekuensi penyuluhan dan bimbingan keagamaan kepada umat Hindu
  - c. Peningkatan umat Hindu yang mengikuti ritual keagamaan di kelompok binaan penyuluh agama Hindu
  - d. Penguatan fasilitasi kegiatan kepedulian sosial yang merupakan perwujudan dari pengamalan nilai-nilai agama Hindu
  - e. Pemberdayaan kelompok sasaran penyuluh dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Hindu



- f. Peningkatan pembinaan pelayanan terhadap keluarga umat Hindu dalam mewujudkan keluarga sakinah dengan nilai-nilai agama Hindu.
- 2) Peningkatan intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Hindu dalam rangka mewujudkan moderasi beragama dicapai dengan strategi:
    - a. Peningkatan peran penyuluh agama, lembaga keagamaan, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga diklat dalam menginternalisasi dan menyebarkan nilai-nilai agama Hindu yang moderat, substantif, inklusif, dan toleran
    - b. Peningkatan frekuensi forum dialog dengan tokoh agama yang mendiskusikan praktik moderasi inter umat beragama Hindu
    - c. Peningkatan frekuensi dialog kerukunan intra umat beragama dalam pencegahan dan penyelesaian konflik
    - d. Peningkatan pembinaan kepada desa kerukunan inter umat beragama
  - 3) Peningkatan kualitas pembinaan moderasi beragama dalam mewujudkan moderasi beragama dicapai dengan strategi:
    - a. Peningkatan pembinaan kepada penyuluh agama Hindu yang berwawasan moderat sebagai garda depan di masyarakat yang memberikan penyuluhan agama kepada umat Hindu
    - b. Peningkatan jumlah penyuluh melalui penyuluh agama Hindu non PNS
    - c. Pemberian tunjangan kepada penyuluh agama non PNS di seluruh Indonesia
    - d. Pemberian Diklat kepada penyuluh agama Hindu non PNS bekerjasama dengan Badan Diklat Kemenag dalam pelaksanaannya
    - e. Penerbitan pedoman kepada penyuluh agama Hindu dalam pelaksanaan tugasnya.
  - 4) Peningkatan keselarasan relasi agama dan budaya, yang difokuskan pada pengendalian konflik antara tradisi dan ritual budaya keagamaan serta meningkatkan khazanah budaya bernafaskan agama dicapai dengan strategi:

- a. Pembinaan lembaga agama dan keagamaan sebagai media dalam memberikan pembinaan kepada umat Hindu, dimana lembaga agama dan keagamaan ini diharapkan mampu memberikan
  - b. Pemberian bantuan operasional kepada lembaga agama dan keagamaan agar senantiasa dapat terus beroperasi untuk membantu pemerintah dalam memberikan pembinaan
  - c. Pembinaan melalui kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama seperti Utsawa Dharmagita dan Festival Keagamaan Hindu.
- 5) Peningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama, dicapai dengan strategi:
- a. Digitalisasi layanan keagamaan agar mudah diakses, transparan dan kaya informasi
  - b. Pengembangan layanan keagamaan terpadu satu pintu di pusat dan daerah yang dilengkapi dengan SOP sehingga mampu menyelesaikan masalah secara langsung
  - c. Peningkatan kompetensi ASN sebagai petugas garis depan (*frontline*) pada satuan kerja agar mempunyai kecakapan teknis dalam memberikan layanan keagamaan tepat waktu, termasuk dalam menggunakan teknologi digital
  - d. Peningkatan akses dan penggunaan kitab suci termasuk melalui produk digital
  - e. Peningkatan penyediaan dan pendistribusian kitab suci yang tepat sasaran
  - f. Peningkatan fasilitasi lembaga keagamaan dalam meningkatkan mutu layanan
  - g. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan peribadatan
  - h. Peningkatan dalam penyediaan rumah ibadah yang suci dan damai
  - i. Pembinaan kepada pengelola rumah ibadah dan pengelola perpustakaan rumah ibadah

- j. Peningkatan siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan diruang publik.
- 6) Peningkatan kualitas penerimaan dana keagamaan Hindu melalui lembaga ekonomi keagamaan Hindu yang dimanfaatkan untuk mendukung untuk pembangunan agama, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan dicapai dengan strategi:
- a. Penyusunan regulasi dan pendataan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dan potensi ekonomi keagamaan umat Hindu
  - b. Meningkatnya pengelolaan, pembinaan dan pemberdayaan dana punia
  - c. Meningkatnya pemberdayaan dan kualitas lembaga dana sumbangan keagamaan (*dharma dana*)
  - d. Peningkatan partisipasi lembaga keuangan dan dunia usaha dalam pemanfaatan dana ekonomi umat dalam rangka ikut mengentaskan kemiskinan
  - e. Peningkatan mutu manajemen pengelola dana sosial keagamaan (*dana punia*) di lembaga dan rumah ibadah
  - f. Peningkatan sosialisasi dalam pemahaman arti pentingnya dana sosial keagamaan (*dana punia*) kepada masyarakat.
- 7) Penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderat pada setiap satuan pendidikan, guna meningkatkan rerata nilai ujian sekolah pada Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman dan rerata nilai ujian mata kuliah pada PTKH yang bermuatan moderasi, dicapai dengan strategi:
- a. Peningkatan kompetensi guru agama Hindu
  - b. Peningkatan guru berkualifikasi S1/S2
  - c. Penguatan dan pemberdayaan KKG/MGMP
  - d. Pemberian Bantuan pada sekolah minggu/pasraman
  - e. Penyempurnaan kurikulum agar bermuatan moderasi beragama
  - f. Peningkatan pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan pada PTKH.

- 8) Peningkatan kualitas asesmen dan kemampuan berfikir siswa, peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran, kemampuan literasi, dan berfikir siswa dalam mata pelajaran Matematika, IPA, dan Bahasa Indonesia dicapai dengan strategi:
- a. Menerapkan kurikulum Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia yang mengintegrasikan penguatan kemampuan berpikir pada semua jenjang pendidikan tingkat sekolah (Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman)
  - b. Penguatan pembelajaran literasi dasar dalam membaca, menulis dan berhitung pada kelas-kelas rendah (kelas 1, 2 dan 3 pada Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman)
  - c. Penguatan kualitas penilaian hasil belajar siswa yang dimanfaatkan untuk basis peningkatan mutu
  - d. Peningkatan pemanfaatan TIK dan pengintegrasian model inovatif dalam pembelajaran
  - e. Penyelenggaraan asesmen kompetensi untuk siswa (Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman)
  - f. Peningkatan buku dan media pembelajaran yang disediakan
  - g. Pemberian tunjangan berdasarkan kinerja kepada guru pada sekolah keagamaan di setiap satuan pendidikan (Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman).
- 9) Peningkatan kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan, dicapai dengan strategi:
- a. Peningkatan jumlah guru yang bersertifikat pendidik
  - b. Peningkatan jumlah dosen yang bersertifikat pendidik
  - c. Peningkatan jumlah guru agama Hindu pada sekolah umum maupun sekolah keagamaan yang mengikuti PPG
  - d. Peningkatan jumlah Guru PA Hindu Non PNS Penerima Tunjangan Profesi

- e. Pemberian beasiswa S2 untuk calon pengawas dan kepala sekolah keagamaan Hindu (Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman)
  - f. Peningkatan jumlah dosen non PNS penerima tunjangan profesi dosen non PNS
  - g. Peningkatan jumlah dosen yang berkualifikasi S3
  - h. Peningkatan jumlah dosen yang menerima sertifikasi dosen
  - i. Peningkatan jumlah dosen non PNS yang menerima tunjangan fungsional dosen non PNS
  - j. Pembinaan kompetensi pada tenaga kependidikan di PTKH.
- 10) Peningkatan partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan, guna meningkatkan jumlah siswa pada Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman setiap tahunnya dicapai dengan strategi:
- a. Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tk Pratama/Adhi/Madya/Utama Widya Pasraman
  - b. PIP Tk Adhy/Madya/Utama Widya Pasraman
  - c. Pembangunan Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman di daerah afirmasi/3T
  - d. PIP Kuliah
  - e. Pemberian Beasiswa Bidik Misi
  - f. Pemberian Beasiswa Prodi Langka
  - g. Pemberian Beasiswa Mahasiswa Miskin
  - h. Pemberian Bantuan Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)
  - i. BOPTN (Bantuan Operasional Pendidikan Tinggi Negeri).
- 11) Peningkatan jumlah guru yang memenuhi SNP per jenjang di setiap daerah dicapai dengan strategi:
- a. Data guru agama Hindu yang akurat
  - b. Data sebaran umat Hindu/peserta didik yang akurat
  - c. Peningkatan kompetensi guru

- d. Peningkatan sebaran akses pendidikan setiap satuan pendidikan; Peningkatan kerjasama dengan Pemerintah daerah
  - e. Pemenuhan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi minimal.
- 12) Peningkatan kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan guna peningkatan jumlah sekolah (Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman) yang memenuhi standar nasional pendidikan serta peningkatan jumlah PTKH yang mendapatkan akreditasi dicapai dengan strategi:
- a. Bantuan sarana dan prasarana pendidikan agar sekolah dan PTKH memenuhi SPM sarana dan prasarana
  - b. Peningkatan penjaminan mutu pada sekolah (Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman) sesuai dengan SNP
  - c. Peningkatan jumlah sekolah (Adhi Widya/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman) yang telah mendapatkan akreditasi
  - d. Penerapan metode pembelajaran daring pada sekolah (Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman)
  - e. Peningkatan jumlah siswa (Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman) yang mengikuti kompetensi nasional maupun internasional
  - f. Implementasi Merdeka Belajar di sekolah (Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman)
  - g. Peningkatan penjaminan mutu pada PTKH
  - h. Peningkatan jumlah PTKH yang telah mendapatkan akreditasi minimal A
  - i. Penerapan metode pembelajaran daring pada PTKH
  - j. Pelaksanaan PPG pada LPTK
  - k. Peningkatan jumlah mahasiswa PTKH yang mengikuti kompetensi nasional maupun internasional

- l. Implementasi Kampus Merdeka pada PTKH.
- 13) Penguatan pendidikan karakter siswa dicapai dengan strategi:
    - a. Pelaksanaan program pendidikan karakter di sekolah (Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman) seperti Pasraman kilat dan Jambore Pasraman
    - b. Peningkatan jumlah sekolah (Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman) yang Ramah Anak
    - c. Kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan di sekolah (Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman)
  - 14) Peningkatan kualitas PTKH yang bereputasi internasional dicapai dengan strategi:
    - a. Peningkatan jumlah PTKH yang memenuhi Standar Akreditasi Internasional
    - b. Peningkatan PTKH yang melakukan kolaborasi Internasional
    - c. Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri.
  - 15) Peningkatan kualitas lulusan PTKH yang diterima di dunia kerja (kerjasama PTKH dengan industri) dicapai dengan strategi:
    - a. Peningkatan pembinaan kepada peserta didik
    - b. Peningkatan kegiatan pengabdian masyarakat
    - c. Peningkatan program magang
    - d. Peningkatan ekstrakurikuler di PTKH dalam rangka meningkatkan skill.
  - 16) Peningkatan kualitas pemanfaatan penelitian, melalui peningkatan jumlah jurnal ilmiah pada PTKH yang terakreditasi nasional dicapai dengan strategi:
    - a. Peningkatan jumlah hasil penelitian PTKH yang memperoleh HAKI
    - b. Peningkatan jumlah hasil penelitian PTKH yang menghasilkan hak paten.
  - 17) Peningkatan kualitas tata kelola organisasi Ditjen Bimas Hindu yang efektif, transparan dan akuntabel, dengan meningkatkan tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan, peningkatan nilai PMPRB, peningkatan nilai SAKIP, peningkatan nilai maturitas SPIP dan peningkatan Indeks

Profesionalitas ASN serta peningkatan kualitas administrasi pendidikan keagamaan dicapai dengan strategi:

- a. Peningkatan pola pikir ASN dalam penerapan perubahan budaya birokrasi yang bersih, disiplin, melayani, dan responsif terhadap perkembangan jaman
- b. Peningkatan kualitas data di bidang agama dan pendidikan yang komprehensif, valid, reliabel, uptodate, dan terdigitalisasi
- c. Pengelolaan portal satu pintu dalam big data melalui integrasi sistem aplikasi data dan informasi
- d. Peningkatan tata laksana pengembangan teknologi informatika dan komunikasi (*e-Government*)
- e. Penguatan *public campaign/maintstreaming*/pengarusutamaan RB secara berkelanjutan oleh seluruh satker dengan mempublikasikan RB
- f. Peningkatan kualitas rencana program dan anggaran berbasis rencana strategis
- g. Peningkatan kualitas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah
- h. Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi hasil kegiatan berbasis kinerja
- i. Peningkatan kualitas kebijakan, program, anggaran dan kegiatan berdasarkan umpan balik yang diperoleh dari hasil evaluasi
- j. Peningkatan layanan tanggap darurat
- k. Penyusunan peta kualitas kebutuhan ASN dan road map peningkatan kompetensinya
- l. Peningkatan koordinasi untuk harmonisasi, sinkronisasi, dan ketercukupan produk hukum yang diperlukan
- m. Restrukturisasi organisasi yang efisien dengan memanfaatkan teknologi
- n. Penerapan pelayanan informasi publik sesuai dengan standar dengan memanfaatkan teknologi



- o. Peningkatan efektivitas sistem administrasi perkantoran dengan memanfaatkan TIK
- p. Peningkatan sistem administrasi pencatatan dan pengelolaan aset BMN
- q. Penguatan pengawasan internal berbasis kinerja
- r. Peningkatan kualitas verifikasi terhadap pengaduan masyarakat.

## B. PENETAPAN KINERJA

Penetapan Kinerja Ditjen Bimas Hindu Tahun 2022 yang berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Renstra merupakan komitmen dari pimpinan yang berisikan tekad dan janji kinerja dalam kurun waktu satu tahun yang disajikan dengan jelas dan dapat diukur serta mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja bertujuan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai bentuk penerima tugas dengan pemberi tugas. Hal ini juga sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan atas pencapaian dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Penetapan Kinerja merupakan bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tagun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Penetapan Kinerja Ditjen Bimas Hindu Tahun 2022 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.  
Penetapan Kinerja Ditjen Bimas Hindu Tahun 2022

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
<b>Bidang Agama</b>			
1	Meningktanya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Hindu	1. Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapat bimbingan agama Hindu	01:10
		2. Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada	80%

		kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal	
2	Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama	1. Persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan	100%
3	Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama	1. Tingkat moderasi beragama kelompok sasaran	85
4	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama	1. Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan	100%
5	Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan	1. Persentase layanan administrasi keagamaan secara digital	40%
		2. Persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran	80%
6	Meningkatnya kualitas penerimaan dana sumbangan keagamaan Hindu	1. Persentase partisipasi umat beragama dalam dharma dana	90%
<b>Bidang Pendidikan</b>			
7	Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat	1. Rerata nilai UASBN Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang bermuatan moderasi beragama	7
		2. Rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTKH/PTU yang bermuatan moderasi beragama	7
8	Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berfikir siswa	1. Rerata Nilai asesmen kompetensi minimum dalam bidang literasi dan numerasi	Lit 400 Num 360
		2. Rerata Nilai asesmen kemampuan berfikir di bidang membaca, matematika, sains dalam PISA	NA

9	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan	1. Persentase guru bersertifikat pendidik	70%
		2. Persentase dosen bersertifikat pendidik	60%
		3. Persentase dosen berkualifikasi S3	22%
10	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan	1. Persentase peningkatan siswa pada Pratama Widya Pasraman	5%
		2. Persentase peningkatan siswa pada Adhi Widya Pasraman	5%
		3. Persentase peningkatan siswa pada Madyama Widya Pasraman	4%
		4. Persentase peningkatan siswa pada Utama Widya Pasraman	4%
		5. Persentase peningkatan mahasiswa pada PTKH	5%
11	Meningkatnya jumlah guru yang memenuhi SNP	1. Persentase provinsi yang jumlah gurunya memenuhi SNP perjenjang	7%
12	Meningkatnya standar dan system penjaminan mutu pendidikan	1. Persentase Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang memenuhi 8 SNP	7%
		2. Persentase Prodi yang terakreditasi A/Unggul	10%
		3. Persentase Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang melaksanakan Prosedur Sistem Penjaminan Mutu dan Manajemen Kelembagaan	7%
		4. Persentase PTKH yang melaksanakan Prosedur Sistem Penjaminan Mutu dan Manajemen Kelembagaan	50%
13	Menguatnya Pendidikan karakter siswa	1. Persentase siswa Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang memperoleh nilai karakter minimal baik	80%
14	Meningkatnya kualitas PTKH yang bereputasi internasional	1. Persentase PTKH yang memperoleh peringkat reputasi internasional	5%

15	Meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima didunia kerja	1. Persentase PTKH yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan	20%
		2. Rerata Nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTKH	
		a. S1	3,10
		b. S2	3,25
		c. S3	3,45
		3. Rerata masa tunggu lulusan PTKH sebelum memperoleh pekerjaan	24 Bulan
16	Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian	1. Persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional	17,50%
<b>Bidang Manajemen</b>			
17	Meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu yang efektif dan akuntabel	1. Persentase tindaklanjut hasil pengawasan yang diselesaikan	75%
		2. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	80,02
		3. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	80,03
		4. Nilai Maturitas SPIP	2,01
		5. Indeks Profesionalitas ASN	74

Penetapan Kinerja Ditjen Bimas Hindu tahun 2022 diimplementasikan dalam 3 bidang dengan 6 kegiatan, sebagai berikut:

1. Bidang urusan agama Hindu yang memuat kegiatan peningkatan kualitas pengelolaan dan pembinaan urusan agama Hindu yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Hindu dalam kehidupan sehari-hari, menyediakan pelayanan kehidupan beragama dan menguatkan peran lembaga keagamaan yang didukung tata kelola yang efektif, efisien dan akuntabel serta mewujudkan pemahaman dan persepsi umat mengenai kerukunan antar umat beragama.

2. Bidang pendidikan Hindu memuat kegiatan peningkatan kualitas pengelolaan dan pembinaan pendidikan Hindu, peningkatan akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi Hindu serta penyelenggaraan administrasi dan perkantoran pendidikan Bimas Hindu.
3. Bidang dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya memuat kegiatan peningkatan pelaksanaan dukungan manajerial dan kualitas pelayanan administrasi serta pelaksanaan tugas teknis lainnya. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut kegiatan yang dilaksanakan adalah penyiapan regulasi atau produk hukum, penataan organisasi, pengelolaan perencanaan dan penganggaran, SDM, keuangan, data, sistem informasi dan hubungan masyarakat, monitoring dan evaluasi kinerja serta pelaporan Ditjen Bimas Hindu.

### C. PERENCANAAN ANGGARAN

Ditjen Bimas Hindu pada tahun 2022 memperoleh alokasi anggaran berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Induk Nomor SP DIPA-025.07-0/2022 tanggal 17 Nopember 2021 sebesar Rp **781.500.789.000**. Alokasi anggaran tahun 2022 ini sama dengan pagu akhir tahun 2021. Bila alokasi anggaran tahun 2022 dibandingkan dengan alokasi anggaran pada Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Bimas Hindu tahun 2022 sebesar Rp 1.112.424.000.000, masih terdapat kekurangan anggaran sebesar 29,75% atau Rp 330.923.211.000. Adapun rincian alokasi anggaran tahun 2022 beserta perbandingan dengan anggaran Renstra pada tabel berikut:

Tabel 3. Perbandingan Alokasi Anggaran dengan Target Anggaran Renstra 2022

Target Anggaran Renstra	Pagu Dipa 2022	Selisih (Target Anggaran Renstra -Pagu Dipa 2022)	(%) Selisish
1.112.424.000.000	781.500.789.000	330.923.211.000	29,75%

Adapun komposisi anggaran Ditjen Bimas Hindu berdasarkan program dan kegiatan tahun 2022 yaitu:

1. 025.07.DC Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama dengan kegiatan 2143 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu sebesar Rp 79.180.867.000 atau 10,13% dari jumlah pagu anggaran;
2. 025.07.DF Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun dengan kegiatan 2142 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu sebesar Rp 34.822.001.000 atau 4,46% dari pagu anggaran;
3. 025.07.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran dengan kegiatan 4436 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Hindu sebesar Rp 36.529.645.000 atau 4,67% dari jumlah pagu anggaran;
4. 025.07.DK Program Pendidikan Tinggi dengan kegiatan 5104 Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Hindu sebesar Rp 117.167.700.000 atau 14,99% dari jumlah pagu anggaran tahun 2022;
5. 025.07.WA Program Dukungan Manajemen terdiri dari 2 kegiatan yaitu kegiatan 2144 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu sebesar Rp 60.408.159.000 atau 7,73% dan kegiatan 5103 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu anggaran sebesar Rp 453.392.417.000 atau 58,02% dari jumlah pagu anggaran;

Adapun lebih detilnya anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Komposisi Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH	%
1	025.07. DC Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	2143 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu	79.180.867.000	10,13%
2	025.07. DF Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	2142 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu	34.822.001.000	4,46%
3	025.07. DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	4436 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Hindu	36.529.645.000	4,67%
4	025.07. DK Program Pendidikan Tinggi	5104 Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Hindu	117.167.700.000	14,99%
5	025.07. WA Program Dukungan Manajemen	2144 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu	60.408.159.000	7,73%
		5103 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu	453.392.417.000	58,02%
		<b>Jumlah</b>	<b>781.500.789.000</b>	<b>100,00%</b>

Pada awal tahun anggaran 2022, anggaran Ditjen Bimas Hindu mengalami *Automatic Adjustment* (AA) berdasarkan Surat Menteri Keuangan RI nomor S-1088/MK.02/2021, tanggal 29 November 2021 tentang *automatic adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022. AA ini merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka mitigasi dampak berlanjutnya dan memburuknya pandemi Covid-19 yaitu dengan melakukan pencadangan anggaran sebesar 5% pada tingkat Kementerian/Lembaga. Berdasarkan kebijakan

tersebut, Ditjen Bimas Hindu memperoleh alokasi blokir AA sebesar Rp 33.289.875.109 dan dalam waktu bersamaan terdapat juga blokir anggaran *existing* Rp 1.220.791.081. blokir *existing* ini merupakan blockir anggaran yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti hal nya kurangnya data dukung terhadap program ataupun kegiatan. Sehingga pada awal tahun 2022 jumlah blokir anggaran Ditjen Bimas Hindu sebesar Rp 34.510.666.190 atau 4,42% dari jumlah pagu anggaran. Pada bulan Juni 2022 terdapat penambahan jumlah AA berdasarkan surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor B-3176/SJ/B.I/KU.00.02/06/2022 tanggal 20 Juni 2022 perihal penambahan AA Kementerian Agama Tahun 2022. Pada lampiran surat tersebut Ditjen Bimas Hindu memperoleh tambahan AA sebesar Rp 19.791.977.000. Namun Ditjen Bimas Hindu hanya sanggup memenuhi sebesar Rp 7.734.121.200. Disamping itu terdapat juga perubahan pembukaan ataupun penggantian anggaran blokir AA tersebut sehingga jumlah yang anggaran yang diblokir hingga triwulan II tahun 2022 sebesar Rp 41.178.416.100 atau 5,27% dari jumlah pagu mengalami perubahan alokasi per jenis belanja. Lebih detil anggaran blokir pada awal anggaran Ditjen Bimas Hindu pada awal tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5. Komposisi Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2022

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	%	Blokir (Existing dan AA #1)	%	Blokir (Existing dan AA #2)	%
1	Belanja Pegawai	474.593.660.000	61%	1.384.465.100	0,29%	1.375.363.100	0,29%
2	Belanja Barang	230.750.088.000	29%	16.042.184.090	6,95%	37.028.015.000	16,05%
3	Belanja Modal	37.696.941.000	5%	17.084.017.000	45,32%	2.775.038.000	7,36%
4	Belanja Bansos	38.460.100.000	5%				
	<b>JUMLAH</b>	<b>781.500.789.000</b>	<b>100%</b>	<b>34.510.666.190</b>	<b>4,42%</b>	<b>41.178.416.100</b>	<b>5,27%</b>



# Bab III

## Akuntabilitas Kinerja

### A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Pengukuran capaian kinerja Ditjen Bimas Hindu dilakukan dengan cara membandingkan antara terget (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) pada masing-masing Sasaran Program (SP) guna menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kinerja yang telah ditetapkan. Adapun formula perhitungan prosentase capaian Indikator Kinerja yang akan digunakan yakni:

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \left( \text{Target} - \left( \frac{\text{Realisasi} - \text{target}}{\text{Target}} \right) \right) \times 100\%$$

Nilai batas atas capaian kinerja sebesar 120% dan batas bawah 0%. Capaian kinerja yang melebihi 120% dan kurang dari 0% akan disertai penjelasan lebih rinci. Adapun status capaian kinerja Ditjen Bimas Hindu tahun 2022 ditunjukkan dengan warna Biru, Hijau, Kuning, dan Merah seperti pada gambar berikut:

> 100 - 120 Sangat Baik	80 - 100 Baik	50 - 79,99 Cukup	< 50 Kurang
----------------------------	------------------	---------------------	----------------

Gambar 1. Status Capaian Kinerja Ditjen Bimas Hindu

Rata-rata nilai capaian kinerja Ditjen Bimas Hindu atas sasaran program triwulan II tahun 2022 sebesar **43,38%** kategori **Kurang**. Capaian ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan I tahun 2022 yang hanya sebesar **19,54%**. Terdapat kenaikan sebesar 23,84% dari triwulan I tahun 2022. Sedangkan bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya pada periode yang sama sebesar **35,26%**, maka capaian triwulan II tahun 2022 **lebih baik** dari triwulan II tahun 2021. Terdapat kenaikan sebesar 8,12% dari tahun sebelumnya pada periode yang sama. Adapun nilai capaian triwulan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6.  
Capaian Kinerja Ditjen Bimas Hindu Triwulan II dan I Tahun 2022

No.	Sasaran Program	IKSP	Periode Pengukuran	Tahun 2022				Progres
				Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II	%	
<b>Bidang Agama</b>					<b>34,62%</b>		<b>34,62%</b>	
1	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Hindu	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Hindu	Triwulan	1:10	1:13	1:13	76,92%	Data mengenai jumlah Penyuluh menggunakan data TW IV Tahun 2021. Juni 2022 diharapkan memperoleh data Riil byname by address. 2022.
		Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal Hindu	Triwulan	80%	0%	0%	0,00%	
2	Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra	Persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan	Triwulan	100%	100%	100%	100,00%	Belum ada kasus konflik intra umat beragama, Kegiatan-kegiatan

	umat beragama Hindu melalui pendekatan moderasi beragama							yang berkaitan moderasi beragama telah dilaksanakan di beberapa wilayah
3	Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama	Tingkat moderasi beragama kelompok binaan (diukur oleh penyuluh dengan panduan nasional)	Tahunan	85	0	0	0,00%	Pengukuran akan dilaksanakan akhir tahun
4	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama	Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan	Triwulan	100%	100%	100%	100,00%	Pada Tahun 2022 belum ada kasus konflik budaya dan agama
5	Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan	Persentase layanan administrasi keagamaan secara digital	Triwulan	40%	0%	0%	0,00%	Penyelesaian draft juknis layanan administrasi keagamaan secara digital
		Persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran	Tahunan	80%	0%	0%	0,00%	anggaran pengadaan kitab suci telah disiapkan, sedang proses pengajuan pengadaan dari leading sektor
6	Meningkatnya kualitas penerima	Persentase partisipasi umat beragama	Semesteran	90,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RPMA sedang harmonisasi di biro

	an dana sumbang an keagamaa n Hindu	dalam dharma dana						hukum dengan Kemenkum ham
<b>Bidang Pendidikan</b>					<b>0,00%</b>		<b>32,87%</b>	
7	Menguatn ya sistem pendidika n yang berpersp ektif moderat	Rerata nilai UASBN Adhi Widya Pasraman/ Madyama Widya Pasraman/ Utama Widya Pasraman yang bermuatan moderasi beragama	Tahunan	7	0	0	0,00%	Pengukura n akan dilaksanak an akhir tahun
		Rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTKH/PTU yang bermuatan moderasi beragama	Semeste ran	7	0	0	0,00%	
8	Meningka tnya asesmen & kemampu an berfikir siswa	Rerata nilai asesmen kompetensi minimum dalam bidang literasi dan numerasi	Tahunan	Literasi: 400 Numerasi: 360	0	0	0,00%	Pengukura n akan dilaksanak an akhir tahun
		Rerata nilai asesmen kemampuan berpikir di bidang membaca, matematika dan sains dalam PISA	Tiga Tahunan	NA	NA	NA	NA	Pengukura n akan dilaksanak an pada tahun 2024
9	Meningka tnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidika n	Persentase guru bersertifikat pendidik	Tahunan	70%	0,00%	0,00%	0,00%	Pengukura n akan dilaksanak an akhir tahun

		Persentase dosen bersertifikat pendidik	Tahunan	60,00%	0%	53,06%	88,44%	
		Persentase dosen berkualifikasi S3	Tahunan	22,00%	0%	20,92%	95,08%	
10	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan Pendidikan	Persentase peningkatan siswa pada Pratama Widya Pasraman	Tahunan	5%	0%	0%	0,00%	Pengukuran akan dilaksanakan akhir tahun
		Persentase peningkatan siswa pada Adhi Widya Pasraman	Tahunan	5%	0%	0%	0,00%	Pengukuran akan dilaksanakan akhir tahun
		Persentase peningkatan siswa pada Madyama Widya Pasraman	Tahunan	4%	0%	0%	0,00%	Pengukuran akan dilaksanakan akhir tahun
		Persentase peningkatan siswa pada Utama Widya Pasraman	Tahunan	4%	0%	0%	0,00%	Pengukuran akan dilaksanakan akhir tahun
		Persentase peningkatan mahasiswa pada PTKH	Tahunan	5,00%	0%	0%	0,00%	Pengukuran akan dilaksanakan akhir tahun
11	Meningkatnya jumlah guru yang memenuhi SNP	Persentase Provinsi yang jumlah gurunya memenuhi SNP per jenjang	Tahunan	7%	0%	0%	0,00%	Pengukuran akan dilaksanakan akhir tahun
12	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu Pendidikan	Persentase Adhi Widya Pasraman/ Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang memenuhi 8 SNP	Tahunan	7%	0%	0%	0,00%	Pengukuran akan dilaksanakan akhir tahun

		Persentase Adhi Widya Pasraman/ Madyama Widya Pasraman/ Utama Widya Pasraman yang melaksanakan prosedur Sistem Penjaminan Mutu dan manajemen kelembagaan	Semesteran	7,00%	0%	19%	120%	
		Persentase Prodi yang terakreditasi A/Unggul	Semesteran	12,00%	0%	7,14%	59,52%	
		Persentase PTKH yang melaksanakan Prosedur Sistem Penjaminan Mutu dan Manajemen Kelembagaan	Semesteran	50%	0%	100%	120%	
13	Menguatkan pendidikan karakter siswa	Persentase siswa Adhi Widya Pasraman/ Madyama Widya Pasraman/ Utama Widya Pasraman yang memperoleh nilai karakter minimal baik	Semesteran	80%	0%	100%	120%	
14	Meningkatnya kualitas PTKH yang bereputasi internasional	Persentase PTKH yang memperoleh predikat reputasi internasional	Tahunan	5%	0%	0%	0,00%	Pencanangan World Class UHN, dalam progres melakukan kerjasama dengan prodi di Univ Luar Negeri

15	Meningkatnya kualitas lulusan PTKH yang diterima di dunia kerja	Persentase PTKH yang bekerjasama dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan	Semesteran	20,00%	0%	0%	0,00%	
		Rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTKH: a. S1, b. S2, c. S3	Semesteran					
		S1		3,1	0	0	0,00%	
		S2		3,25	0	0		
		S3		3,45	0	0		
		Rerata masa tunggu lulusan PTKH sebelum memperoleh pekerjaan	Tahunan	24 Bulan	0%	0%	0,00%	Pengukuran akan dilaksanakan akhir tahun
16	Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian	Persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional	Tahunan	17,50%	0%	31,08%	120%	
<b>Bidang Manajemen</b>					<b>24,00%</b>		<b>65,78%</b>	
17	Meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu yang efektif dan akuntabel	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan yang diselesaikan	Triwulan	75,00%	87,75%	91,25%	120,00%	
		Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Triwulan	80,02	0	84,16	105,17%	
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Triwulan	80,03	0	83,01	103,72%	
		Nilai Maturitas SPIP	Triwulan	2,01	0	0	0,00%	

	Indeks Profesionalitas ASN	Semesteran	74	0	0	0,00%
	Rata-rata capaian Triwulan I dan II 2022			19,54%		43,38%

Capaian kinerja Ditjen Bimas Hindu tahun 2022 diperoleh dari hasil pengukuran 36 Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP). Adapun rinciannya yaitu terdapat 7 IKSP dengan capaian diatas 100% kategori sangat baik, 4 IKSP capaiannya antara 80% hingga 100% kategori baik, 2 IKSP dengan capaian antara 50% hingga 79,99% dengan kategori cukup dan 23 IKSP belum dapat diukur capaiannya karena masih berproses sehingga dimasukkan dalam kategori kurang. Adapun IKSP yang memperoleh capaian kategori sangat baik yakni persentase Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang melaksanakan prosedur Sistem Penjaminan Mutu dan Manajemen Kelembagaan, persentase PTKH yang melaksanakan Prosedur Sistem Penjaminan Mutu dan Manajemen Kelembagaan, persentase siswa Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang memperoleh nilai karakter minimal baik, persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional, persentase tindaklanjut hasil pengawasan yang diselesaikan, Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Bila dibandingkan dengan capaian IKSP pada tahun sebelumnya dalam periode yang sama, capaian triwulan II tahun 2022 **lebih baik** dari triwulan II tahun 2021. Namun demikian pencapaian triwulan II 2022 masih kurang, dan terus berprogres dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan hingga akhir tahun 2022. Adapun perbandingan capaian kinerja triwulan II tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 7.**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Ditjen Bimas Hindu Triwulan I Tahun 2021 dan 2022**

No.	Sasaran Program	IKSP	Periode Pengukuran	Tahun 2021-2022			Keterangan
				Realisasi TW II 2021	Realisasi TW II 2022	Perbandingan TW II 2021-2022 (%)	
<b>Bidang Agama</b>							
1	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Hindu	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Hindu	Triwulan	1:13	1:13	0,00	Tidak ada Peningkatan yang signifikan
		Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal Hindu	Triwulan	65%	0%	-65%	Belum dilaksanakannya pengukuran pada TW II tahun 2022
2	Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Hindu melalui pendekatan moderasi beragama	Persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan	Triwulan	100%	100%	0,00%	Tidak ada kasus konflik intra umat beragama
3	Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama	Tingkat moderasi beragama kelompok binaan (diukur oleh penyuluh dengan panduan nasional)	Tahunan	0	0	0,00	Belum dilaksanakan pengukuran

4	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama	Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan	Triwulan	100%	100%	0,00%	Pada tahun 2022 belum ada kasus konflik budaya dan agama yang masuk Bimas Hindu
5	Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan	Persentase layanan administrasi keagamaan secara digital	Triwulan	0%	0%	0,00%	Tidak ada Peningkatan
		Persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran	Tahunan	0%	0%	0,00%	Belum dilaksanakan pengukuran
6	Meningkatnya kualitas penerimaan dana sumbangan keagamaan Hindu	Persentase partisipasi umat beragama dalam dharma dana	Semesteran	0,03%	0,00%	-0,03%	RPMA sedang harmonisasi di biro hukum dengan Kemenkumham,
<b>Bidang Pendidikan</b>							
7	Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat	Rerata nilai UASBN Adhi Widya Pasraman/ Madyama Widya Pasraman/ Utama Widya Pasraman yang bermuatan moderasi beragama	Tahunan	0	0	0,00	Belum dilaksanakan pengukuran
8	Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat	Rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTKH/PTU yang	Semesteran	0	0	0,00	Belum dilaksanakan pengukuran

		bermuatan moderasi beragama					
9	Meningkatnya asesmen & kemampuan berfikir siswa	Rerata nilai asesmen kompetensi minimum dalam bidang literasi dan numerasi	Tahunan	0	0	0,00	Belum dilaksanakan pengukuran
		Rerata nilai asesmen kemampuan berpikir di bidang membaca, matematika dan sains dalam PISA	Tiga Tahunan	0	NA	NA	Rerata nilai asesmen kemampuan berpikir di bidang membaca, matematika dan sains dalam PISA akan diukur tahun 2021 dan 2024
10	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan	Persentase guru bersertifikat pendidik	Tahunan	0,00%	0,00%	0,00%	Belum dilaksanakan pengukuran
11	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik	Persentase dosen bersertifikat pendidik	Tahunan	0%	53,06%	53,06%	Pada TW II tahun 2021 IKSP ini belum diukur sedangkan TW II tahun 2022 sudah dilakukan pengukuran
		Persentase dosen berkualifikasi S3	Tahunan	0%	20,92%	20,92%	Pada TW II tahun 2021 IKSP ini belum diukur sedangkan TW II tahun 2022 sudah dilakukan pengukuran
12	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada	Persentase peningkatan siswa pada Pratama Widya Pasraman	Tahunan	0%	0%	0,00%	Belum dilaksanakan pengukuran

	satuan Pendidikan	Persentase peningkatan siswa pada Adhi Widya Pasraman	Tahunan	0%	0%	0,00%	Belum dilaksanakan pengukuran
		Persentase peningkatan siswa pada Madyama Widya Pasraman	Tahunan	0%	0%	0,00%	Belum dilaksanakan pengukuran
		Persentase peningkatan siswa pada Utama Widya Pasraman	Tahunan	0%	0%	0,00%	Belum dilaksanakan pengukuran
		Persentase peningkatan mahasiswa pada PTKH	Tahunan	0%	0%	0,00%	Belum dilaksanakan pengukuran
13	Meningkatnya jumlah guru yang memenuhi SNP	Persentase Provinsi yang jumlah gurunya memenuhi SNP per jenjang	Tahunan	0%	0%	0,00%	Belum dilaksanakan pengukuran
14	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu Pendidikan	Persentase Adhi Widya Pasraman/ Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang memenuhi 8 SNP	Tahunan	0%	0%	0,00%	Belum dilaksanakan pengukuran
		Persentase Adhi Widya Pasraman/ Madyama Widya Pasraman/ Utama Widya Pasraman yang melaksanakan prosedur Sistem Penjaminan Mutu dan	Semesteran	0%	19%	19%	Pada TW II tahun 2021 IKSP ini belum diukur sedangkan TW II tahun 2022 sudah dilakukan pengukuran

		manajemen kelembagaan					
15	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu Pendidikan	Persentase Prodi yang terakreditasi A/Unggul	Semesteran	0%	7,14%	7,14%	Pada TW II tahun 2021 IKSP ini belum diukur sedangkan TW II tahun 2022 sudah dilakukan pengukuran
		Persentase PTKH yang melaksanakan Prosedur Sistem Penjaminan Mutu dan Manajemen Kelembagaan	Semesteran	0%	100%	100%	Pada TW II tahun 2021 IKSP ini belum diukur sedangkan TW II tahun 2022 sudah dilakukan pengukuran
16	Menguatnya pendidikan karakter siswa	Persentase siswa Adhi Widya Pasraman/ Madyama Widya Pasraman/ Utama Widya Pasraman yang memperoleh nilai karakter minimal baik	Semesteran	100%	100%	0,00%	
17	Meningkatnya kualitas PTKH yang bereputasi internasional	Persentase PTKH yang memperoleh predikat reputasi internasional	Tahunan	NA	0%	0,00%	Belum dilaksanakan pengukuran, dan Persentase PTKH yang memperoleh predikat reputasi internasional mulai diukur pada tahun 2022

18	Meningkatnya kualitas lulusan PTKH yang diterima di dunia kerja	Persentase PTKH yang bekerjasama dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan	Semestera n	30,77%	0%	-30,77%	Pada TW II tahun 2021 IKSP telah dilakukan pengukuran sedangkan TW II tahun 2022 belum dilakukan pengukuran
		Rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTKH: a. S1, b. S2, c. S3	Semestera n				Belum dilaksanakan pengukuran
		S1		0	0	0,00	
		S2		0	0		
		S3		0	0		
		Rerata masa tunggu lulusan PTKH sebelum memperoleh pekerjaan	Tahunan	0	0	0,00	Belum dilaksanakan pengukuran
19	Meningkatnya kualitas peminfaatan penelitian	Persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional	Tahunan	0%	31,08%	31,08%	Pada TW II tahun 2021 IKSP ini belum diukur sedangkan TW II tahun 2022 sudah dilakukan pengukuran
Bidang Manajemen							
20	Meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu yang efektif dan akuntabel	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan yang diselesaikan	Triwulan	87,75%	91,25%	3,50%	Ada peningkatan sebesar 3,5% bila dibandingkan dengan capain TW II tahun sebelumnya
		Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Triwulan	79,85	84,16	4,31	Terdapat kenaikan pada tahun 2022 sebesar 4,31 pada periode yang sama
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Triwulan	0	83,01	83,01	Pada TW II tahun 2021 IKSP ini belum diukur sedangkan TW II tahun 2022 sudah

							dilakukan pengukuran
		Nilai Maturitas SPIP	Triwulan	0	0	0,00	Belum dilaksanakan pengukuran
		Indeks Profesionalitas ASN	Semesteran	0	0	0,00	Belum dilaksanakan pengukuran
<b>Rata-rata Persentase TW II 2021 dan 2022</b>				<b>35,26%</b>	<b>43,38%</b>		

## B. REALISASI ANGGARAN

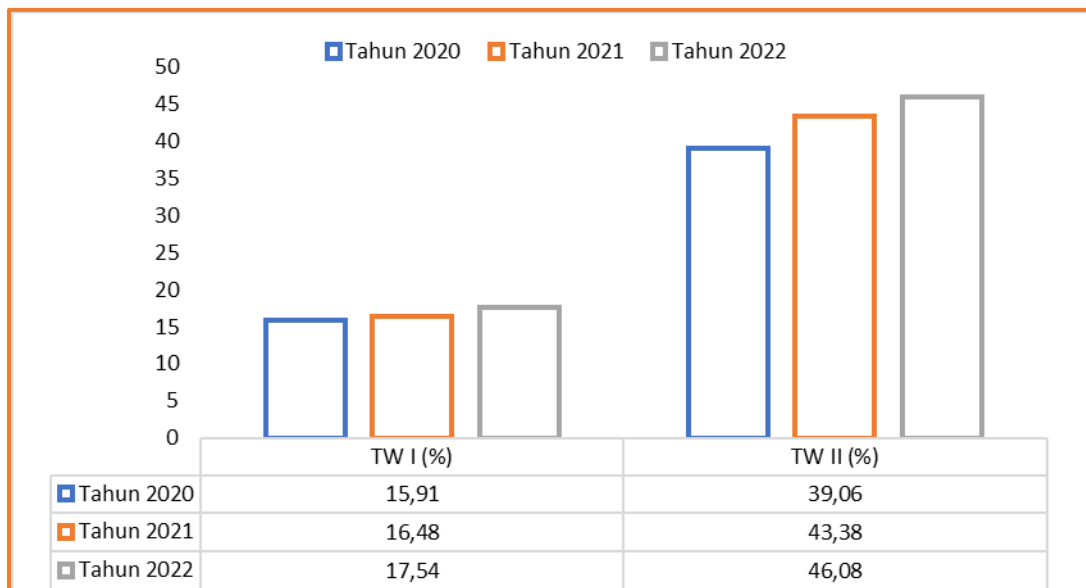
Rata-rata realisasi anggaran Ditjen Bimas Hindu triwulan II Tahun 2022 sebesar Rp360.141.247.187 atau 46,08% dari jumlah anggaran sebesar Rp781.500.789.000. Realisasi ini mengalami **kenaikan** dibandingkan dengan triwulan I tahun 2022 yang sebesar Rp137.037.254.777 atau 17,54%. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama, rata-rata realisasi triwulan II tahun 2022 **lebih baik** dari triwulan II tahun 2021 yang hanya sebesar 43,38%. Terdapat gap kenaikan sebesar 2,71% dari tahun sebelumnya pada periode yang sama. Terdapat kendala dalam realisasi anggaran yaitu adanya dua kali *Automatic Adjustment* (AA) pada anggaran fungsi agama sehingga banyak aktivitas kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Adapun realisasi anggaran triwulan II tahun 2022 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Realisasi Anggaran Tahun 2021-2022

(% Realisasi TW II Tahun2021	(% Realisasi TW I Tahun2022	TW II Tahun 2022			
		Pagu	Realisasi	%	Sisa
43,38	17,54	781.500.789.000	360.141.247.187	46,08	421.359.541.813

Tren realisasi anggaran triwulan I dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 cenderung mengalami kenaikan. Namun bila dibandingkan dengan rata-rata target realisasi minimal, maka realisasi triwulan I tahun 2022 yang mencapai target. Selanjutnya realisasi triwulan II tahun 2022 juga kecenderungan terdapat kenaikan

dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Bila realisasi triwulan II 2020-2022 ini dibandingkan dengan target realisasi minimal, maka realisasi triwulan II 2020-2022 belum mencapai target realisasi minimal. Adapun rata-rata target realisasi minimal sebesar 47,50. Perlu upaya keras untuk terus meningkatkan realisasi Ditjen Bimas Hindu agar dapat menacapai target minimal berdasarkan rata-rata realisasi target pada Perdirjen Perbendaharaan. Adapun tren realisasi anggaran triwulan I dan II tahun 2020 sampai dengan 2022 seperti grafik berikut:



Grafik 1. Tren Realisasi Triwulan I dan II Tahun 2020 s.d 2022

1. Realisasi Anggaran berdasarkan Fungsi

Realisasi anggaran fungsi agama pada triwulan II 2022 sebesar 50,76% mengalami kenaikan sebesar 33,61% dari triwulan I tahun 2022 yang capaiannya sebesar 17,15%. Realisasi fungsi agama triwulan II tahun 2022 juga lebih baik dari tahun sebelumnya pada periode yang sama yang hanya mencapai 48,15%. Realisasi pada fungsi agama ini mengalami kendala akibat anggaran pada fungsi agama ini mengalami blokir AA dua kali, sehingga banyak dari aktivitas kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Seperti contoh bahwa anggaran aktivitas kegiatan yang terdiri dari beberapa jenis mata anggaran, yang mana 2 mata anggaran terblokir AA (jasa profesi dan perjalanan paket meeting) sehingga hanya



menyisakan mata anggaran belanja bahan, menyebabkan aktivitas kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan. Untuk anggaran pada fungsi pendidikan pada triwulan II tahun 2022 terealisasi sebesar 45,07%. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 27,45% dari triwulan I 2022 yang hanya 17,62%. Rrealisasi anggaran fungsi pendidikan triwulan II tahun 2022 juga lebih baik dari realisasi pada triwulan II 2021. Realisasi anggaran fungsi pendidikan relatif lebih rendah dari realisasi fungsi agama hal ini disebabkan kendala teknis seperti perubahan perangkat pengelola keuangan. Adapun realisasi anggaran berdasarkan fungsi dapat dilihat pada berikut:

Tabel 9. Realisasi Anggaran Berdasarkan Fungsi Tahun 2021-2022

Fungsi	Realisasi TW II Tahun 2021 (%)	Realisasi TW I Tahun 2022 (%)	Triwulan II Tahun 2022			
			Pagu	Realisasi	( % )	Sisa
Agama	48,15	17,15	139.589.026.000	70.861.017.912	50,76	68.728.008.088
Pendidikan	42,34	17,62	641.911.763.000	289.280.229.275	45,07	352.631.533.725
Jumlah	43,38	17,54	781.500.789.000	360.141.247.187	46,08	421.359.541.813

## 2. Realisasi Anggaran berdasarkan Program

Realisasi anggaran triwulan II 2022 pada program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun sebesar 56,27%. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 38,69% dari realisasi triwulan I tahun 2022 sebesar 17,58%. Realisasi ini juga lebih baik bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya pada periode yang sama. Selanjutnya realisasi anggaran program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama pada triwulan II tahun 2022 sebesar 57,41%. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 39,20% dari realisasi triwulan I 2022 yang sebesar 18,22%. Realisasi anggaran program ini juga lebih baik dari realisasi triwulan I tahun 2021. Lebih lanjut realisasi anggaran program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran triwulan II sebesar 48,42%. Realisasi ini mengalami peningkatan sebesar 29,07% dari tiwulan I 2022 sebesar 19,36%. Realisasi anggaran program ini juga lebih baik dari realisasi triwulan I tahun 2021. Berikutnya realisasi anggaran program Pendidikan Tinggi triwulan II tahun 2022 sebesar 43,40%.

Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 26,99% dari triwulan I 2022 yang sebesar 16,41%. Realisasi anggaran program ini juga lebih baik dari realisasi triwulan I tahun 2021. Dan terakhir realisasi anggaran program Dukungan Manajemen triwulan II tahun 2022 sebesar 44,09%. Realisasi ini mengalami kenaikan 26,54% dari triwulan I 2022 yang sebesar 17,55%. Realisasi anggaran program ini lebih rendah dari realisasi triwulan I tahun 2021. Realisasi anggaran pada program Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama paling tinggi dan terendah realisasi program Pendidikan Tinggi. Adapun rincian anggarannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Realisasi Anggaran Berdasarkan Program TW II Tahun 2021-2022

NO	Kode   Nama Program	Realisasi TW II Tahun 2021 (%)	Realisasi TW I Tahun 2022 (%)	Triwulan II Tahun 2022			
				Pagu	Real	%	Sisa
1	025.07.DF   Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	56,20	17,58	34.822.001.000	19.593.638.263	56,27	15.228.362.737
2	025.07.DC   Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	51,35	18,22	79.180.867.000	45.461.650.077	57,41	33.719.216.923
3	025.07.DI   Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	39,26	19,36	36.529.645.000	17.688.847.812	48,42	18.840.797.188
4	027.07.WA   Program Dukungan Manajemen	44,44	17,55	513.800.576.000	226.547.696.385	44,09	287.252.879.615
5	025.07.DK   Program Pendidikan Tinggi	30,90	16,41	117.167.700.000	50.849.414.650	43,40	66.318.285.350
	Jumlah	43,38	17,54	781.500.789.000	360.141.247.187	46,08	421.359.541.813

### 3. Realisasi Anggaran berdasarkan Kegiatan

Realisasi anggaran triwulan II tahun 2022 kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu (2142) sebesar 56,27%. Realisasi ini naik sebesar 38,69% dari tiwulan I 2022 yang sebesar 17,58%. Realisasi anggaran kegiatan ini lebih baik dari tiwulan II tahun 2021. Berikutnya realisasi anggaran kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu (2143) triwulan II tahun 2022 sebesar 57,41%. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 39,20% dari triwulan

I 2022 yang sebesar 18,22%. Realisasi anggaran kegiatan ini lebih baik dari tiwulan II tahun 2021. Selanjutnya realisasi anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu (2144) triwulan II 2022 sebesar 42,05%. Realisasi ini mengamali kenaikan sebesar 26,29% dari triwulan I 2022 yang sebesar 15,76%. Realisasi anggaran kegiatan ini lebih baik dari tiwulan II tahun 2021. Lebih lanjut realisasi anggaran peningkatan mutu dan relavansi pendidikan agama Hindu pada triwulan II 2022 sebesar 48,42%. Realisasi ini meningkat sebesar 29,07% dari triwulan I 2022 yang sebesar 19,36%. Berikutnya realisasi anggaran kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu (5103) sebesar 44,37%. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 26,57% dari triwulan I 2022 yang sebesar 17,79%. Terakhir realisasi kegiatan (5104) Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Hindu sebesar 43,30%. Realisasi ini mengalami peningkatan sebesar 26,99% dari triwulan I 2022 yang sebesar 16,41%. Secara keseluruhan bahwa realisasi anggaran triwulan II tahun 2022 dari 4 kegiatan kode 2142, 2143, 4436, 5104 lebih baik dari tahun sebelumnya pada periode yang sama. Namun terdapat 2 kegiatan dengan kode 2144 dan 5103 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya pada periode yang sama. Adapun realisasi anggaran berdasarkan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan Tahun 2021-2022

NO	Kode   Nama Kegiatan	Realisasi TW II Tahun 2021 (%)	Realisasi TW I Tahun 2022 (%)	Triwulan II 2022			
				Pagu	Real	%	Sisa
1	2142   Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu	52,20	17,58	34.822.001.000	19.593.638.263	56,27	15.228.362.737
2	2143   Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu	51,35	18,22	79.180.867.000	45.461.650.077	57,41	33.719.216.923
3	2144   Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu	43,82	15,76	60.408.159.000	25.399.367.835	42,05	35.008.791.165
4	4436   Peningkatan Mutu dan Relevansi	39,26	19,36	36.529.645.000	17.688.847.812	48,42	18.840.797.188

	Pendidikan Agama Hindu						
5	5103   Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu	44,52	17,79	453.392.417.000	201.148.328.550	44,37	252.244.088.450
6	5104   Peningkatan Akses Mutu Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Hindu	30,90	16,41	117.167.700.000	50.849.414.650	43,40	66.318.285.350
	Jumlah	43,38	17,54	781.500.789.000	360.141.247.187	46,08	421.359.541.813

#### 4. Realisasi Anggaran berdasarkan Jenis Belanja

Realisasi anggaran per jenis belanja tahun 2022 telah ditetapkan target realisasi minimal berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga yaitu untuk jenis belanja pegawai sebesar 50%, untuk belanja barang sebesar 50%, belanja modal sebesar 40% dan belanja bansos sebesar 50%.

Realisasi anggaran belanja pegawai triwulan II tahun 2022 sebesar 43,81%. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 26,25% dari triwulan I 2022 yang sebesar 17,56%. Realisasi belanja pegawai triwulan II 2022 ini lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya pada periode yang sama. Bila dibandingkan dengan target minimal, maka realisasi belanja pegawai pada triwulan II ini tidak mencapai target. Selanjutnya realisasi anggaran belanja barang pada triwulan II 2022 sebesar 51,56%. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 35,20% dari triwulan I 2022 yang hanya 16,36%. Realisasi belanja ini lebih baik dari realisasi tahun 2021 pada periode yang sama. Begitu juga realisasi belanja barang triwulan II juga melebihi target minimal. Berikutnya realisasi belanja modal triwulan II tahun 2022 sebesar 28,08%. Realisasi ini meningkat sebesar 16,84% dari triwulan I yang hanya sebesar 11,24%. Realisasi ini juga lebih baik dari realisasi tahun sebelumnya pada periode yang sama. Namun realisasi belanja modal triwulan II 2022 tidak mencapai target minimal sesuai Junkis Perdirjen Perbendaharaan. Terakhir yaitu realisasi belanja bantuan sosial triwulan II

tahun 2022 sebesar 58,92%. Realisasi ini meningkat sebesar 28,45% dari triwulan I 2022 yang hanya sebesar 30,47%. Realisasi bansos ini lebih baik dari realisasi triwulan II tahun 2021. Realisasi bansos triwulan II 2022 juga mencapai target minimal Juknis Perdirjen Perbendaharaan. Walaupun mencapai target untuk belanja bansos, namun terdapat 1 satker perguruan tinggi dengan realisasi masih nol, disebabkan masih dalam tahap pengumpulan data untuk penerimaan KIP Kuliah. Untuk belanja modal mengalami realisasi paling rendah dibandingkan dengan jenis belanja yang lain karena belanja tersebut masih dalam tahap pelaksanaan kontrak khususnya anggaran modal di empat Perguruan Tinggi dan Satker Pusat sehingga belum dapat dibayarkan. Adapun rincian realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 12. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2021-2022**

Jenis Belanja	Realisasi TW II Tahun 2021 (%)	Realisasi TW I Tahun 2022 (%)	Triwulan II Tahun 2022			
			Pagu	Realisasi	( % )	Sisa
Belanja Pegawai	44,22	17,56%	474.593.660.000	207.918.433.715	43,81	266.675.226.285
Belanja Barang	44,97	16,36%	230.750.088.000	118.977.208.039	51,56	111.772.879.961
Belanja Modal	27,83	11,24%	37.696.941.000	10.584.230.433	28,08	27.112.710.567
Belanja Bansos	33,94	30,47%	38.460.100.000	22.661.375.000	58,92	15.798.725.000
Jumlah	43,38	17,54%	781.500.789.000	360.141.247.187	46,08	421.359.541.813

#### 5. Realisasi Anggaran Berdasarkan Kewenangan

Realisasi anggaran triwulan II tahun 2022 pada satker pusat sebesar 46,89%. Realisasi ini meningkat sebesar 43,40% dari triwulan I 2022 yang hanya sebesar 3,49%. Realisasi triwulan II 2022 satker pusat ini lebih baik dari realisasi tahun sebelumnya pada periode yang sama. Terdapat kendala realisasi anggaran pada triwulan I 2022 perubahan perangkat pengelola keuangan pada awal tahun 2022 dan adanya kendala pencairan pada aplikasi sakti oleh bendahara pengeluaran. Selanjutnya realisasi satker daerah (Prov/Kab/Kota) pada triwulan II 2022 sebesar 47,06%. Realisasi ini mengalami peningkatan sebesar 27,50% dari

triwulan I 2022 yang sebesar 19,56%. Realisasi ini juga lebih baik dari triwulan II tahun 2021. Kemudian realisasi anggaran triwulan II 2022 satker PTKHN sebesar 43,57%. Realisasi ini naik sebesar 23,55% dari realisasi triwulan I 2022 yang sebesar 20,02%. Realisasi triwulan II 2022 lebih baik dari triwulan II tahun 2021. Adapun rincian realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2021-2022

Kewenangan	Realisasi TW II Tahun 2021 (%)	Realisasi TW I Tahun 2022 (%)	Triwulan II Tahun 2022			
			Pagu	Realisasi	(%)	Sisa
Satker Pusat	39,94	3,49%	104.360.668.000	48.930.309.336	46,89	55.430.358.664
Daerah (Prov/Kab/Kota)	45,52	19,56%	463.002.397.000	217.904.971.194	47,06	245.097.425.806
Daerah (PTKHN)	40,21	20,02%	214.137.724.000	93.305.966.657	43,57	120.831.757.343
Jumlah	43,38	17,54%	781.500.789.000	360.141.247.187	46,08	421.359.541.813

### C. NILAI KINERJA ANGGARAN

Capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen Bimas Hindu Triwulan II tahun 2022 sebesar **58,97** kategori **kurang**. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar 11,00 dari NKA triwulan I 2022 yang sebesar 47,97. NKA ini diperoleh dari jumlah Nilai Kinerja pada aplikasi Smart dengan bobot 60% dan nilai Indikator Pelaksanaan Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada OM SPAN dengan bobot 40% sebagaimana tabel berikut

Tabel 14. NKA Triwulan I dan II Tahun 2022

Nilai	Bobot	TW I		TW II	
		Nilai	NKA (Nilai x Bobot)	Nilai	NKA (Nilai x Bobot)
SMART	60%	17,55	10,53	35,68	21,00
IKPA	40%	93,59	37,44	93,91	37,56
Jumlah			<b>47,97</b>		<b>58,97</b>

Untuk nilai kinerja dari aplikasi Smart sebesar 35,68 diperoleh dari hasil pengukuran evaluasi Aspek Implementasi dengan bobot 33,3% dan Evaluasi Aspek Manfaat dengan bobot 66,7%. Evaluasi atas Aspek Implementasi terdiri dari Capaian

Output dengan bobot 43,5%, Penyerapan Anggaran dengan bobot 9,7%, Efisiensi dengan bobot 28,6% dan Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dengan bobot 18,2%. Untuk evaluasi atas Aspek Manfaat terdiri dari capaian Sasaran Program. Sedangkan nilai IKPA triwulan II 2022 sebesar 93,91 diperoleh dari OM SPAN.

Kendala dalam meningkatkan NKA Ditjen Bimas Hindu Tahun 2022 yaitu terdapat informasi kinerja yang berupa indikator kinerja sasaran program maupun output program tidak muncul pada aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kemenkeu. Solusi yang telah dilakukan yaitu mengajukan revisi informasi kinerja ke Kementerian PPN/Bappenas melalui Biro Perencanaan Kementerian Agama. Namun hingga saat ini belum dapat diperbaiki karena harus melalui *trilateral meeting* ketika memperbaiki informasi kinerja level sasaran program dan output program.

# Bab IV

## Penutup

### A. KESIMPULAN

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja Ditjen Bimas Hindu Triwulan II Tahun 2022 antara lain:

1. Berdasarkan pengukuran oleh Bidang Perencanaan Ditjen Bimas Hindu, dapat disampaikan bahwa secara keseluruhan capaian kinerja triwulan II tahun 2022 sebesar **45,38%** kategori **Kurang**. Capaian ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan I tahun 2022 yang hanya sebesar **19,54%**. Bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya pada periode yang sama sebesar **35,26%**, maka capaian triwulan II tahun 2022 **lebih baik** dari triwulan II tahun 2021.
2. Pengukuran Indikator Sasaran Program baru sebagian kecil dilakukan karena tergantung periode pengukuran dan masih proses pelaksanaan.
3. Capaian realisasi anggaran Ditjen Bimas Hindu triwulan II Tahun 2022 sebesar Rp **360.141.247.187** atau **46,08%** dari jumlah anggaran sebesar Rp 781.500.789.000. Realisasi ini mengalami **kenaikan** dibandingkan dengan triwulan I tahun 2022 yang sebesar Rp **137.037.254.777** atau **17,54%**. Rata-rata realisasi triwulan II tahun 2022 **lebih baik** dari triwulan II tahun 2021 yang hanya sebesar 43,38%. Terdapat gap kenaikan sebesar 2,71% dari tahun sebelumnya pada periode yang sama.
4. NKA Ditjen Bimas Hindu Triwulan II tahun 2022 sebesar **58,97** kategori **kurang**. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar 11,00 dari NKA triwulan I 2022 yang sebesar 47,97.



## B. SARAN

Terhadap beberapa permasalahan yang ada dan sebagai bentuk perbaikan dalam rangka pencapaian target SP dan IKSP Ditjen Bimas Hindu pada periode berikutnya, terdapat beberapa saran yang perlu segera ditindaklanjuti, antara lain:

1. Mempercepat penetapan perangkat pengelola keuangan.
2. Mempercepat realisasi anggaran guna menunjang tercapainya target dan sasaran.
3. Mempercepat proses pengadaan khususnya kontrak yang jangka waktu pengerjaannya relatif panjang.
4. Melakukan pemantauan secara periodik per bulan atau sesuai kebutuhan untuk mengawal pencapaian SP dan IKSP dengan memantau penyelesaian kegiatan yang mendukung IKSP Ditjen Bimas Hindu.
5. Melakukan digitalisasi dan integrasi data sehingga memudahkan memperoleh data yang berhubungan dengan data capaian IKSP Renstra Ditjen Bimas Hindu.
6. Melakukan bimbingan/pendampingan kepada seluruh Satker khususnya dalam penginputan pelaporan pada sistem monitoring terpadu (Smart dan e Monev).